

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* TERHADAP
DEMOKRASI DAN PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT DALAM
MEMILIH CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**



Oleh:

Muhamad Rafli

NIM: 201910110311473

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**ANALISIS YURIDIS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* TERHADAP
DEMOKRASI DAN PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT DALAM
MEMILIH CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

Muhamad Raffli

NIM: 201910110311473

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**ANALISIS YURIDIS ADANYA PRESIDENTIAL THRESHOLD
TERHADAP DEMOKRASI DAN PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT
DALAM MEMILIH CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI
INDONESIA**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RAFLI

201910110311473

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

Pembimbing Utama,


Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Dekan,




Prof. Dr. Toppat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD RAFLI

201910110311473

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 11 Mei 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

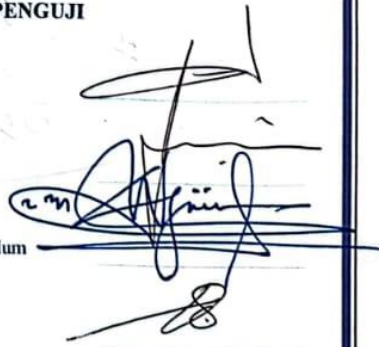
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Penguji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji II : Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

Handwritten signatures of the examiners and secretary, including a large signature for the Chairman (Ketua) and smaller signatures for the examiners and secretary.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD RAFLI

NIM : 201910110311473

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS ADANYA PRESIDENTIAL THRESHOLD
TERHADAP DEMOKRASI DAN PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT
DALAM MEMILIH CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI
INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“Ethics is knowing the difference between what you have a right to do and”

What is right to do

“Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani”



ABSTRAKSI

Nama : Muhamad Rafli
Nim : 201910110311473
Judul : **ANALISIS YURIDIS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* TERHADAP DEMOKRASI DAN PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT DALAM MEMILIH CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**
Pembimbing : **1. Dr. Surya Anoraga, S.H., M.H**
2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H

Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yang dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat sebagaimana tercantum pada konstitusi kita pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagaimana pada pasal tersebut menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam penelitian kali ini berupaya mengkaji *Presidential Threshold* dalam perspektif kedaulatan rakyat dan Implikasi terhadap demokrasi di Indonesia. Dalam penelitian kali ini diharapkan menjadi salah satu acuan atau pengembangan dalam ilmu interdisiplin. Peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif dengan analisis diskriptif. Berdasarkan analisis penulis terhadap isu hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Hasil penelitian dari implikasi adanya *Presidential Threshold* atau ambang batas dalam pencalonan presiden menjadi polemik di Indonesia, karena dianggap membatasi kadidat pemimpin negara. Karena sejumlah hak telah dikurangi, termasuk hak partai politik peserta pemilu yang terhambat oleh keberadaan ambang batas yang tidak semua partai dapat memenuhinya. Selain itu, pilihan yang dimiliki oleh rakyat akan semakin terbatas karena keberadaan *Presidential Threshold* akan mengurangi variasi opsi dalam proses pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan juga Implikasi terhadap sistem demokrasi yang menciptakan polarisasi dalam masyarakat.

Kata Kunci : *Presidential Threshold*, Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, pemilu, partai politik

ABSTRACT

Nama : Muhamad Rafli
Nim : 201910110311473
Judul : ANALISIS YURIDIS *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
TERHADAP DEMOKRASI DAN PERSPEKTIF KEDAULATAN
RAKYAT DALAM MEMILIH CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
Pembimbing : 1. Dr. Surya Anoraga, S.H., M.H
2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H

Indonesia adheres to a democratic system where the highest authority is held by the people, as stated in our constitution in Article 1, paragraph (2) of the Basic Law of the Republic of Indonesia. As mentioned in that article, it emphasizes that sovereignty rests in the hands of the people and must be exercised in accordance with the Basic Law. The people have sovereignty, responsibility, rights, and obligations to democratically choose leaders who will govern and serve all layers of society, as well as to elect representatives to oversee the functioning of the government. In this research, the aim is to examine the existence of the Presidential Threshold from the perspective of sovereignty and its implications for democracy in Indonesia. In this research, it is expected to serve as a reference or contribute to the development in the field of interdisciplinary science. The researcher utilizes normative juridical research with descriptive analysis. Based on the author's analysis of the legal issues focused on in this study, the research results indicate that the implications of the Presidential Threshold or the threshold in the presidential candidacy have become a polemic in Indonesia. This is because it is considered to limit the candidacy of national leaders, as several rights, including those of political parties participating in elections, are hindered by the existence of a threshold that not all parties can meet. Furthermore, the choices available to the people will be increasingly limited because the presence of the Presidential Threshold will reduce the variety of options in the process of electing the President and Vice President, leading to implications for the democratic system that create polarization within society.

Key Word : Presidential Threshold, People sovereignty, Democracy, election, political parties

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karuniaNya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* TERHADAP DEMOKRASI DAN PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT DALAM MEMILIH CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN” skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Ibu Enik Sri Ratnawati (Mama) dan Bapak Wahyudi (Ayah) yang selalu mencintai dan sudah menjadi sosok yang kuat serta selalu menginspirasi penulis. Terimakasih karena tidak pernah bosan dan letih untuk memberikan dukungan baik secara imateril maupun materil terhadap Penulis. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Wildan Lutfiansyah (kakak) Yusuf firdaus (adik) yang telah mendukung penulis tanpa kenal lelah.;
2. Bapak Prof Dr. H. Nazaruddin Malik, SE. M.SI, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Prof, Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum (Wakil Dekan I), Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H (Wakil Dekan II), Said Noor Prasetyo, S.H., M.H (Wakil Dekan III) dan Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum;
4. Bapak Dr Surya Anoraga, S.H., M.H dan Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H.. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis. Penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalmnya karena telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Serta mengajarkan penulis arti

bersabar dalam hal menunggu dan sadar tidak semua yang diinginkan langsung tercapai karena semua butuh proses;

5. Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H selaku dosen wali penulis di Kelas J angkatan 2019 selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak mendukung selama penulis menimba ilmu;
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kiranya telah banyak memberikan pengetahuan pada Penulis selama di Fakultas Hukum
7. Teman-teman Penulis yang telah banyak memberikan warna selama pekuliahan penulis yaitu Teguh Bahrudin Yusuf, Achmad Arif Alvianto, Dimas Ageng Galimukti, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan untuk segala waktu dan dukungannya, semoga pertemanan kita terus terjaga walau nantinya terbatas oleh jarak;
8. Seluruh teman-teman awal perkuliahan pada Kelas J Penulis, semoga kita tetap menjadi keluarga, dan semoga hubungan persaudaraan dan pertemanan kita terus terjaga. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Segala bentuk kritik dan saran akan penulis terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa yang akan datang karena penulis sangat menyadari bahwasanya baik penulis maupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 3 mei 2024

Muhamad Rafli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Analisa Bahan Hukum.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16

A. Teori kedaulatan rakyat.....	16
1. Pengertian Kedaulatan Rakyat	16
2. Tujuan Kedaulatan Rakyat.....	18
B. Teori Demokrasi.....	22
1. Pengertian Demokrasi.....	22
2. Peran Masyarakat dalam Memelihara Demokrasi.....	25
3. Ciri-ciri Demokrasi.....	26
4. Prinsip-prinsip Demokrasi.....	28
C. Tinjauan Umum Pemilihan Umum.....	28
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	29
2. Asas-asas pemilihan Umum	30
3. Prinsip dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum	31
4. Tujuan Pemilihan Umum	32
5. Fungsi Pemilihan Umum.....	32
D. Tinjauan Umum <i>Presidential Threshold</i>	33
1. Pengertian <i>Presidential Threshold</i>	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Analisis Yuridis <i>Presidential Threshold</i> Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia.....	36
B. Implikasi Hukum <i>Presidential Threshold</i> dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden apakah melanggar kebebasan rakyat dalam menentukan pilihannya.....	43
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis Yang Berkaitan	6
Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis Yang Berkaitan	7
Tabel 3. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis Yang Berkaitan	8



DAFTAR PUSTAKA

BUKU/E-BOOK :

- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syafriadi, S. (2017). Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *UIR Law Review*, 1(1), 25-38.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57, 295.
- Törnquist, O., Warouw, N., Samadhi, W. P., Asgart, S. M., Subono, N. I., Nur, A., ... & Priyono, A. E. (2009). *Demokrasi di Atas Pasir: Kemajuan dan Kemunduran Demokratisasi di Indonesia*. Power Conflict Democracy Publication.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media
- Nasution, S. (1995). *Metode research (penelitian ilmiah): usul tesis, desain penelitian, hipotesis, validitas, sampling, populasi, observasi, wawancara, angket*. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title).
- Streb, M. J. (Ed.). (2012). *Law and election politics: The Rules of the game*. Routledge.
- Azhari, A. F. (2010). *Demokrasi & Autokrasi*. Pandiva Buku.
- Kusnardi, M. (1978). *Susunan pembagian kekuasaan menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945*. PT. Gramedia.
- Bastian, S., & Luckham, R. (Eds.). (2003). *Can democracy be designed?: the politics of institutional choice in conflict-torn societies* (Vol. 2). Zed books
- Mahfud, M. (2003). Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan/Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.
- Tutik, T. T., & SH, M. (2016). *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media.
- Sujatno, A. (2004). *Moral dan etika kepemimpinan merupakan landasan ke arah*

kepemerintahan yang baik (good governance). Direktorat Jenderal

SKRIPSI :

- Prasetyo, E. (2013). *Demokrasi dan problem kepemimpinan politik di Indonesia (Pemikiran politik politisi muda: Yuddy Chrisnandi, M. Fadjroel Rachman, Budiman Sudjatmiko, dan Fadli Zon)*.
- Muazzinah, R. (2019). *Konsep Demokrasi (Studi Komparatif Antara Pemikiran Abul A'la Al-Maududi Dan Prakteknya Di Indonesia)* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Adkha, T. (2019). *URGENSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Sayogo, A. B. (2018). *Presidential Threshold Berdasarkan Perolehan Suara Pemilu Sebelumnya Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dalam Perspektif Kedaulatan rakyat. Skripsi, UIN Brawijaya malang*
- Haitsam Nuril Brantas Anarki, H. (2021). *ANALISIS YURIDIS PRESIDENSIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DITINJAU DARI PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

JURNAL :

- Ernasari, N., & Rakhmatika, D. (2021). *Dampak Penerapan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemilu Di Indonesia. Jurnal Lex Specialis, 2(2), 329-340.*
- Hapsari, Y. D. P., & Saraswati, R. (2023). *Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1), 70-84.*
- Rasfanjani, F. A. A., & Arbani, T. S. (2023). *Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia. Alauddin Law Development Journal, 5(1), 24-*

32.

- Asshiddiqie, J. (1994). Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia: pergeseran keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme dalam kebijakan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi selama tiga masa demokrasi, 1945-1980-an. (*No Title*).
- Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor penerapan pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal Ham*, 11(1), 1-25.
- Mayo, H. B. (1960). An introduction to democratic theory. (*No Title*).
- Wijaya, A. (2014). Demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(01), 136-158.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
https://scholar.google.co.id/scholar?cluster=11014350980341786287&hl=id&as_sdt=2005&scioldt=0,5
- Mukhtarrija, M., Handayani, I. G. A. K. R., & Riwanto, A. (2017). Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 644-662.
- Damaitu, E. R., & Wada, I. A. (2017). Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat. *Lentera Hukum*, 4, 157.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhamad Rafli

Nim : 201910110311473

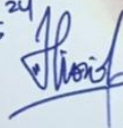
Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS YURIDIS PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP DEMOKRASI DAN PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT DALAM MEMILIH CALON WAKIL PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

15/5



LOLOS
PLAGIASI



Malang, 3 mei 2024

Cholidah, SH., MH.

Ka. Prodi Hukum
Supra & Hukum.